

**KEMANDIRIAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2019
DALAM PERSPEKTIF BOURDIEU
(Studi di Jawa Timur)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



Disusun oleh :

**INSAN QORIAWAN
NIM : 201620270211020**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Oktober 2020**

KEMANDIRIAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2019
DALAM PERSPEKTIF BOURDIEU
(Studi di Jawa Timur)

Ditujukan oleh

INSAN QORIAWAN
201620270211020

Telah disetujui


Pada hari/tanggal, Kamis/ 22 Oktober 2020

Pembimbing Utama



Dr. Tri Sulistyaningsih

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Ishomuddin

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. ~~Wahsan~~ In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi



Prof. Dr. Ishomuddin

TESIS

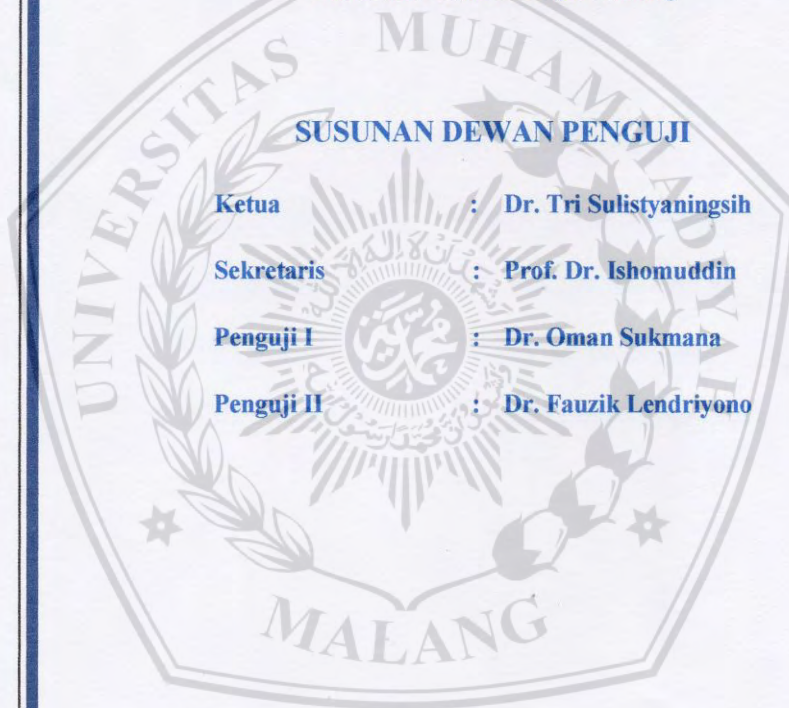
Dipersiapkan dan disusun oleh :

INSAN QORIAWAN
201620270211020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Kamis/ **22 Oktober 2020**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Tri Sulistyaningsih
Sekretaris	:	Prof. Dr. Ishomuddin
Penguji I	:	Dr. Oman Sukmana
Penguji II	:	Dr. Fauzik Lendriyono



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **INSAN QORIAWAN**
NIM : **201620270211020**
Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul : **KEMANDIRIAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF BOURDIEU (Studi di Jawa Timur)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 November 2020
Yang menyatakan,



INSAN QORIAWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kehendak-Nya tesis dengan judul “KEMANDIRIAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF BOURDIEU (Studi di Jawa Timur) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemandirian kpu sebagai penyelenggara pemilu menurut perspektif Bourdieu. Adapun tujuannya agar para penyelenggara benar-benar dapat menerapkan asas-asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam regulasi sehingga dapat menjaga kemandiriannya dengan baik serta dapat melaksanakan pemilu dengan lebih berkualitas

Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang tidak ternilai kepada:

1. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Ishomuddin, selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi sekaligus sebagai pembimbing.
3. Ibu Dr. Tri Sulistyaningsih, selaku pembimbing utama.
4. Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan di lingkungan Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Rekan-rekan kerja yang telah membantu dan memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

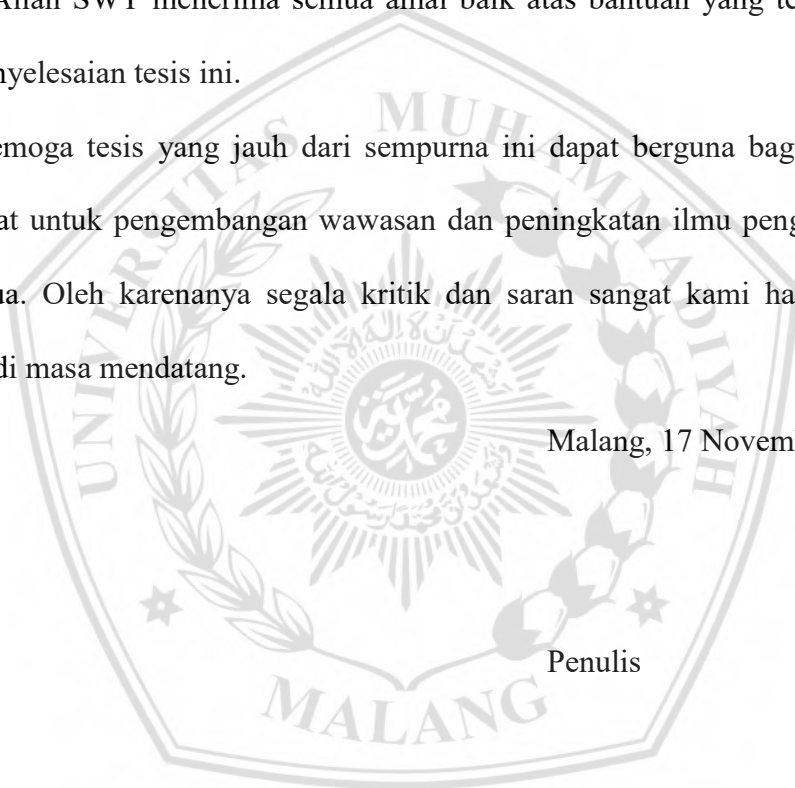
6. Rekan-rekan kuliah di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah banyak membantu baik moril maupun materil.
7. Dan yang paling utama dan spesial, kedua orang tua dan seluruh keluarga (istri, anak-anak dan keluargaku yang lain), yang senantiasa bersabar dan tidak pernah lelah memberikan dorongan dan semangat secara lahir dan batin.

Semoga Allah SWT menerima semua amal baik atas bantuan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga tesis yang jauh dari sempurna ini dapat berguna bagi masyarakat, bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Oleh karenanya segala kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Malang, 17 November 2020

Penulis



MOTTO

“BERGUNALAH BAGI SESAMA”



PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

1. Ibu-Bapakku, tiada yang lebih pantas mendapatkan segala kehormatan dan kebanggaan atas segala jerih payah dan perjuangan mendidik dan membesarkan putra-putrinya.
2. Istriku, ibu dari Titha', Totti, dan Asa. Wanita terhormat, sederhana dan apa adanya. Pendamping hidupku yang selalu sabar dan tawakal dengan segala keadaan.
3. Anak-anakku, generasi penerus yang aku berharap agar kelak mereka menjadi manusia yang berguna bagi sesama.



ABSTRAK

Insan Qoriawan; Kemandirian KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Dalam Perspektif Bourdieu (Studi di Jawa Timur) **Dr. Tri Sulistyaningsih**

Email: qoriawan@gmail.com

Latar Belakang. Mandiri adalah kunci utama dari sifat dan karakter penyelenggara pemilu dengan sifat imparial, jujur, integritas dan netral. Ketidakmandirian KPU sebagai penyelenggara masih ditemui pada kasus-kasus pelanggaran kode etik dalam perkara DKPP, (DKPP, 2020). Terdapat 1.010 pelanggaran etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc* di Jawa Timur, 80 diantaranya diberhentikan dan 930 diberikan sanksi peringatan oleh KPU kabupaten/kota. Perspektif strukturalisme Bourdieu tentang habitus, modal, dan arena menjelaskan proses transformasi kekuasaan dalam ranah sosial selalu ada yang dominan dan mendominasi. Ketidakseimbangan modal dari peserta pemilu dan ketidakberhasilan proses strukturalisasi habitus dalam KPU menyebabkan terjadinya praktik-praktik sosial pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Rumusan Masalah. Bagaimana persepsi dan implementasi kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019 dalam perspektif Bourdieu.

Metode Penelitian. Penelitian menggunakan paradigma definisi sosial dan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah anggota KPU di tiga Kabupaten di Jawa Timur dan informan adalah anggota KPU selain sebagai subyek, PPK, Bawaslu dan parpol. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisa deskriptif kualitatif yang bersifat induktif.

Hasil Penelitian. Praktik-praktik sosial pelanggaran kemandirian penyelenggara pemilu dengan pemberian sanksi akibat pelanggaran badan *ad hoc* seperti tidak netral, disuap, manipulasi rekapitulasi suara. Konsep Pierre Bourdieu menjawab bentuk habitus, modal dan arena yang menunjukkan adanya praktik sosial berbagai bentuk dugaan pelanggaran kemandirian penyelenggara. Struktur subyektif tentang ketidakmandirian yang dimiliki agen badan *ad hoc* harus mampu dikontrol oleh struktur obyektif yang dimiliki penyelenggara di atasnya seperti KPU kabupaten/kota. Karenanya proses internalisasi habitus yang dimiliki oleh penyelenggara di atasnya harus kuat dan mengakar, ini harus dilakukan agar terwujudnya pemilu yang berintegritas.

Kesimpulan. Ketidakmandirian penyelenggara pemilu ini bisa terjadi karena faktor materi, latar belakang keaktifan di partai politik, kekerabatan dan kesamaan hubungan organisasi dengan peserta pemilu. Sedangkan keterpaksaan pelaksanaan kemandirian penyelenggara pemilu adalah karena faktor regulasi kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Kata kunci: kemandirian, penyelenggara pemilu, perspektif Bourdieu

ABSTRACT

Insan Qoriawan; Independence KPU As The Organizer General Election 2019 in Bourdieu Perspective (Study in East Java) **Dr. Tri Sulistyaningsih**
Email: qoriawan@gmail.com

Background. Independence is the main key to the character of an election organizer with impartiality, honesty, integrity and neutrality. The KPU's independence as the organizer is still found in cases of code of ethics violations in the DKPP case (DKPP, 2020). There were 1,010 ethical violations committed by ad hoc bodies in East Java, 80 of which were dismissed and 930 were given warning sanctions by KPU. Bourdieu's perspective of structuralism on habitus, capital, and arenas explains that the process of transforming power in the social sphere is always dominant and dominant. The imbalance of capital from election participants and the unsuccessful process of structuring the habitus in the KPU led to social practices of violating the ethics of election administrators.

Problem. How is the perception and implementation of the KPU's independence as the 2019 general election organizer from the Bourdeu perspective.

Methods. The study used a social definition paradigm and a qualitative descriptive approach. The research subjects were members of KPU in three districts in East Java and the informants were members of the KPU except being the subject, PPK, Bawaslu and political parties. Collecting data by interview, observation and documentation then analyzed descriptively qualitative inductive.

Result. Social practices of violating the independence of the election organizers by imposing sanctions for violations of ad hoc bodies such as not being neutral, bribing, manipulating vote recapitulation. The concept of Pierre Bourdieu answers the forms of habitus, capital and arena which indicate the existence of various social practices of alleged violations of the independence of KPU organizers. The subjective structure of the independence of the ad hoc agency agents must be able to be controlled by the objective structure of the top administrators KPU. Therefore, the process of internalizing the habitus possessed by the organizers above must be strong and rooted, this must be done so that elections with integrity are realized.

Conclusion. This independence of election organizers can occur due to material factors, background of activity in political parties, kinship and similarity in relations between organizations and election participants. Meanwhile, the forced implementation of the independence of the election organizers is due to the factor of code of ethics regulation as the election organizer.

Keywords: *independence, election management, Bourdieu perspective*

DAFTAR ISI

Bahasan	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Penelitian terdahulu	4
2.2. Kerangka konseptual.....	6
2.3. Perspektif teori strukturalisme genetis pierre bourdieu	8
3. METODE PENELITIAN.....	10
3.1. Paradigma penelitian.....	10
3.2. Pendekatan dan tipe penelitian	10
3.3. Lokasi penelitian.....	11
3.4. Subyek dan informan	11
3.5. Teknik pengumpulan data.....	12
3.6. Teknik analisis data	12
3.7. Teknik peningkatan keabsahan	12
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	15
4.1. Pemilu di jawa timur.....	15
4.2. Hasil penelitian	18
4.3. Pembahasan	22
5. PENUTUP.....	32
5.1. Kesimpulan	32
5.2. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau disingkat pemilu merupakan implementasi kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat; Undang-Undang No 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan Pemilu, demokrasi yang berasaskan nilai-nilai kebebasan manusia merupakan landasan utama. Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang diselenggarakan dengan mengedepankan dan menegakkan asas serta prinsip yang tertuang dalam konstitusi. Berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (luber jujur) dan prinsip mandiri dan profesional. Arif Budiman menyatakan bahwa ada 3 (tiga) terobosan dilakukan KPU untuk Pemilu yang berkualitas dan berintegritas yaitu menata akses informasi publ, menjamin hak konstitusional warga, menjaga otentisitas suara rakyat, (Hanafi, 2016).

Mandiri berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Sedangkan profesional bermakna bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

Kemandirian KPU, khususnya penyelenggara Pemilu menjadi sorotan banyak pihak setelah sejumlah pelanggaran dilakukan penyelenggara selama Pemilu 2019. Setidaknya terdapat 1.010 pelanggaran etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc* di seluruh Jawa Timur, 80 diantaranya diberhentikan dan 930 disanksi peringatan oleh KPU Kabupaten/Kota, (KPU Jatim, 2019).

Di sisi lain, terdapat upaya mengubah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan untuk kepentingan

pribadi atau kelompoknya. Upaya mengubah hasil penghitungan ini dilakukan di beberapa jenjang, dari formulir C1 di TPS, hasil rekapitulasi tingkat desa bahkan sampai hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

Godaan untuk bisa mendapatkan kursi dengan cara yang curang dan melawan hukum sangat tinggi. Selain dana, tenaga dan waktu yang di pertaruhkan ada juga ideology, harga diri dan kepentingan dari pendukung. Jual beli suara, intimidasi, paksaan serta manipulasi cukup banyak terjadi. Keterlibatan penyelenggara dalam upaya mengubah hasil penghitungan suara tersebut sangat besar peranannya. Kolaborasi antara pihak yang menghendaki perubahan hasil pemungutan suara dengan penyelenggara yang “nakal” berpotensi menjadikan hasil pemilu “cacat” dan *unlegitimate*, (Kemitraan, 2011).

Mandiri adalah kunci utama dari sifat dan karakter penyelenggara pemilu yang diharapkan memiliki sifat imparcial, jujur, integritas dan menjaga netralitas. Ketidakmandirian KPU sebagai penyelenggara masih ditemui pada kasus-kasus pelanggaran kode etik dalam perkara DKPP, (DKPP, 2020). Ketidakmandirian ini seiring sejalan dengan ketidakprofesionalan KPU dalam melaksanakan kerja-kerja teknisnya. Dimulai dari verifikasi partai politik, rekrutmen badan *ad hoc*, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, kampanye, penyediaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan hasil pemilu dan calon terpilih.

Dua hal penting yang harus dikedepankan dalam prinsip ini adalah akurat dan teliti pada setiap aktivitas dan operasional kerja saat melaksanakan tahapan. KPU sebagai lembaga yang dalam pengambilan keputusannya menggunakan mekanisme kolektif kolegial, hasil putusan/keputusannya tentu sangat dipengaruhi sikap dari anggota-anggotanya. sikap tersebut akan berimplikasi terhadap kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Perspektif strukturalisme genetik Pierre Bourdieu, (Bourdieu, 2010) tentang habitus, modal, dan arena menjelaskan bagaimana proses transformasi kekuasaan dalam ranah sosial selalu ada yang dominan dan mendominasi. Keadaan ini terwujud sebagai akibat kelebihan sumber daya modal yang dimiliki oleh seseorang, baik itu material maupun simbolik. Modal dimaknai sebagai akumulasi sumber daya yang dimiliki oleh seseorang sehingga mendapatkan energi sosial. Arena adalah tempat

transformasi kekuasaan terjadi, dimana modal diperebutkan, dipertahankan dan dipertukarkan untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan habitus dimaknai sebagai kognitif atau struktur sosial yang diinternalisasi sebagai hasil dari sistem yang berlangsung. Karenanya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus bisa menjadi wasit yang melaksanakan peran dan fungsinya agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.

Dalam kontestasi transformasi kekuasaan menurut Pierre Bourdeu bahwa setiap calon harus memiliki setidaknya 3 modal untuk bisa melakukan pertarungan politik. Adapun ketiga modal tersebut adalah modal politik (*political capital*), modal sosial, (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*). Besaran dari ketiga modal ini akan sangat mempengaruhi preferensi pemilih dalam memilih calonnya. Semakin besar kumulatif modal yang dimiliki seorang calon, maka akan semakin besar peluang untuk dipilih masyarakat, (Marijan, 2006).

Modal sosial adalah modal seorang calon dikenal dan memiliki label positif oleh masyarakat. Label positif ini merupakan pengenalan-pengenalan secara fisik dan sosial oleh masyarakat terhadap calon, apakah calon tersebut pantas dipilih ataukah tidak. Selain modal sosial, ada modal ekonomi yang merupakan kemampuan calon melakukan pembiayaan untuk kampanye sebelum pemilihan. Modal ini dibutuhkan setidaknya untuk melakukan mobilisasi massa, mencetak poster, mencetak banner dan membiayai iklan di media. Bisa dikatakan modal ekonomi ini menjadi factor utama terpilihnya seorang calon. Sedangkan modal yang terakhir adalah modal politik yang berarti dukungan mesin partai politik terhadap calon.

Ketidakseimbangan kepemilikan modal dalam perebutan kekuasaan mengakibatkan terjadi pertarungan politik dalam arena menjadi tidak seimbang juga. Ada calon yang mendominasi dan dominan yang memungkinkan akan melakukan berbagai cara untuk bisa meraih kursi dalam Pemilu, salah satunya adalah dengan menyuap penyelenggara Pemilu. Penyuapan bisa terjadi manakala proses strukturalisasi habitus dalam tubuh KPU sebagai penyelenggara gagal. Penyelenggara tidak berhasil melakukan internalisasi asas-asas kemandirian sebagai penyelenggara.

Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki heterogenitas dan pluralitas yang tinggi sehingga potensial memunculkan konflik kepentingan politik. Secara

khusus, pulau Madura dan enam daerah di tapal kuda menjadi prioritas pengamanan ekstra saat proses pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu 2019. Enam daerah tersebut adalah kabupaten dan kota Pasuruan, kabupaten dan kota Probolinggo, kabupaten Situbondo, kabupaten Bondowoso, kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Wilayah tapal kuda ini memiliki tingkat kerawanan tinggi dan memiliki sejarah konflik saat Pemilu, (Kompas 15 April 2019).

Berdasarkan paparan di atas, dilakukan penelitian mengenai “KEMANDIRIAN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF BOURDIEU (Studi di Jawa Timur)”.

1.1 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kemandirian KPU oleh penyelenggara pemilu 2019 dalam perspektif Bourdieu?
2. Bagaimana implementasi kemandirian KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2019?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian Kurniawan, H.G., mengenai profesionalitas KPU dalam pemilu legislatif 2009 (Studi tentang pengaruh profesionalitas pada pemilu legislatif). Penelitian ini mengkaji pengaruh profesionalisme dalam pemilu legislatif 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, profesionalisme kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu legislatif berpengaruh terhadap hasil pencapaian pemilu. Semakin banyak anggota KPU yang bersikap profesional maka semakin tinggi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif.

Penelitian Josner Simanjuntak (2016) tentang “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia” menyimpulkan bahwa kemandirian lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia penting untuk mewujudkan pemilu yang demokratis tetapi dalam pelaksanaan belum sepenuhnya menunjukkan kemandirian, disebabkan secara institusional dan

administratif masih dipengaruhi lembaga lain serta secara fungsional, komisioner kurang independen, belum imparial dan kurang profesional.

Nurahmawati meneliti “Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Peserta Pemilu” (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017), menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perspektif peserta pilkada dalam melihat integritas KIP Aceh sebagai penyelenggara pemilu. Perbedaan pandangan tersebut dipengaruhi oleh relasi politik antar peserta pilkada dan relasi peserta pilkada dengan KIP Aceh. Namun setelah dikaji secara keseluruhan perspektif peserta pemilu terhadap KIP Aceh telah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang berintegritas.

Penelitian Mudiwati Rahmatunnisa (dkk) tentang “Evaluasi Kinerja DKPP Dalam Penanganan Kasus Pemilukada Serentak Jawa barat tahun 2015” menyimpulkan bahwa secara kualitatif DKPP sudah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berintegritas dalam penanganan setiap kasus etika yang ada di pemilukada serentak Jawa Barat Tahun 2015.

“Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada” merupakan penelitian dari Alboin Pasaribu. *Pertama*, model kelembagaan penyelenggara pemilu setelah reformasi adalah model independen yang tidak melibatkan perwakilan partai politik maupun birokrasi (*non-partisan and independent model*). Sekalipun, partai politik dan pemerintah berupaya masuk ke dalam institusi penyelenggara pemilu. *Kedua*, penafsiran MK atas kemandirian penyelenggara pemilu bahwa kemandirian yang dikehendaki oleh UUD 1945 meliputi aspek institusional, fungsional, dan personal.

Penelitian Utuh Suparto mengenai Mekanisme Pilkada dalam Sistem Demokrasi Langsung (Studi kasus Pilkada Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat). Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Bima tahun 2008 terdapat beberapa masalah: anggaran pilkada, Daftar Pemilihan Tetap (DPT), adanya mobilisasi dan penggiringan massa dari luar kota Bima dalam kampanye maupun didaftar sebagai pemilih, dan penetapan perolehan suara.

2.2. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kemandirian

Mandiri berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

Penyelenggara pemilu berkarakter mandiri memiliki 4 indikator: (1) bukan anggota partai politik; (2) tidak berada di bawah lembaga apapun (eksekutif, legislatif, yudikatif atau lembaga lain); (3) melaksanakan tugas dan wewenang tidak berada di bawah tekanan, paksaan, ataupun suap dari siapa pun dan dalam bentuk apapun; (4) menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu (Asy'ari, 2019).

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Di dalam UU yang sama dalam pasal 7 (3) disebutkan, *“Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewengannya”*. Hal ini menegaskan bahwa kemandirian KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah syarat mutlak bagi terlaksananya pemilihan umum yang berkualitas.

2. Konsep Profesionalitas

Profesional maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Penyelenggara pemilu yang profesional melaksanakan seluruh tugas dan wewenang berdasarkan keahlian tentang tata kelola pemilu dan bidang keahlian lainnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu tidak mungkin dilaksanakan hanya berdasarkan pengalaman atau tradisi saja, melainkan harus berdasarkan keahlian tata kelola pemilu, hukum dan bidang keahlian pendukung lainnya.

Penyelenggara pemilu yang kompeten atau profesional diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, yaitu tepat waktu, anggaran, sarana, dan personil (Asy'ari, 2019).

3. Komisi Pemilihan Umum

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Pasal 6 UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Tugas, wewenang, dan Kewajiban masing-masing bagian diatur secara tegas dalam UU tersebut.

4. Pemilu Berkualitas

Pemilu berkualitas adalah pemilu yang diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selainnya itu, makna pemilu berkualitas dan berintegritas mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau *free and fair election*. (Budiman, 2019).

Keadilan pemilu, menurut *Electoral Integrity Group*, yang dideklarasikan dengan judul *Towards International Statement of Principles of Electoral Justice* di Accra, Ghana, 15 September 2011 terdiri atas 10 prinsip. Prinsip itu, adalah : (1) integritasnya tinggi; (2) melibatkan banyak warga; (3) berkepastian hukum; (4) imparial dan adil; (5) profesional dan independen; (6) transparan; (7) tepat waktu sesuai dengan rencana; (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; (9) teratur; (10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang (Budiman, 2019).

Berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat 1 pemilu demokratis adalah pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Undang Undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional.

2.3. Perspektif Teori Strukturalisme Genetik Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu adalah seorang filsuf Prancis yang memiliki filosofi pemikiran tentang struktur sosial yang ada di masyarakat, sekaligus perubahan-perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi secara terus menerus. Bourdieu mengembangkan teori yang memiliki orientasi hubungan dialektika antara struktur obyektif yang dipadu dengan fenomena subyektif dalam relasi sosial. Orientasi pemikirannya disebut “Strukturalisme Genetik”. Tujuan analisis sosial Bourdieu adalah membongkar struktur dominasi ekonomi, dominasi simbolik yang menimbulkan ketidakadilan di masyarakat dan selalu ditutupi.

Bourdieu mendefinisikan strukturalisme genetik dengan cara berikut: Analisis struktur-struktur obyektif – analisis dari bidang-bidang yang berbeda- tidak dapat dipisahkan dari analisis genesis, di dalam individu biologis, struktur-struktur mental yang pada suatu tingkat merupakan produk penggabungan struktur-struktur sosial; tidak dapat dipisahkan, juga, dari analisis genesis atas struktur-struktur sosial itu sendiri; ruang sosial, dan kelompok-kelompok yang mendudukinya, adalah produk-produk perjuangan historis (yaitu para agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka di dalam ruang sosial dan dengan struktur mental yang merupakan sarana mereka memahami ruang sosial ini)(Ritzer, 2012).

Teori Bourdieu lahir dijiwai oleh keinginannya untuk memadukan semangat antara objektivisme dan subjektivisme. Dalam aliran pemikiran objektivisme, terlalu menekankan pada peranan struktur yang menentukan aktor dan lingkungan sosialnya, di sini kaum objektivisme lebih melihat secara makro atau biasa disebut dengan aliran strukturalis seperti Durkheim, Marx, Saussure dan lainnya. Di sisi lain, pemikiran subjektivisme lebih melihat pada sisi mikro, yaitu menekankan pada tindakan aktor dalam analisisnya, tokoh subjektivisme misalnya seperti Weber, Sartre, dan lainnya. Bourdieu menentang kedua pemikiran ini dan ingin menggabungkan di antara keduanya. Karena menurut Bourdieu, tidak semua hal dipengaruhi secara mutlak atau dominan oleh struktur maupun oleh aktor, tetapi ada pengaruh timbal balik dari keduanya. Sehingga Bourdieu berusaha untuk membuat hubungan dialektik antara struktur obyektif dan fenomena subjektif.

Upaya Bourdieu untuk menjembatani antara objektivisme dengan subjektivisme, dapat dilihat dari konsep Bourdieu tentang habitus dan lingkungan (ranah) dan hubungan dialektik antara keduanya. Habitus berada di dalam pikiran aktor sedangkan lingkungan berada di luar pikiran aktor. Meskipun sebenarnya semua konsep dari Bourdieu saling berkaitan dan mempengaruhi (Ritzer, 2004).

Bourdieu memiliki pendapat akan sulit melepas pandangan dari tatanan idealisme objektivisme tanpa melepaskan aktivitas reduksi kesadaran sebagai catatan. Praktik sosial menurut Bourdieu merupakan hasil dialektika antara internalisasi proses internal dan eksternal. Internal melekat pada diri pelaku sosial sedangkan eksternal merupakan struktur obyektif diluar pelaku sosial. Rumus generatif menurut Bourdieu bahwa praktik sosial merupakan hasil dari perkalian habitus dan modal dan ditambah dengan arena. $\text{Praktik sosial} = (\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah}$, (Mutahir, 2011).

Habitus sebagai dasar dalam memahami konsep Bourdieu, yang merupakan struktur kognitif yang menjembatani antara individu dengan realitas sosial. Habitus juga bisa dikatakan sebagai seperangkat tatanan yang memungkinkan individu-individu didalamnya menghasilkan keberpihakan kepada praktik-praktik yang diadaptasi dari perubahan sosial yang terjadi secara dinamis. Individu dalam praktik sosial yang dimaksud adalah calon-calon legislative dengan partai yang berbeda-beda tetapi memiliki kesamaan tujuan yaitu mendapatkan suara dari pemilih. Kesamaan tujuan ini adalah ciri tersebut terbentuk dalam struktur sosial diluar mereka yang diinternalisasi kemudian menjadi habitus, (Burke, 2001).

Menurut Bourdieu, setidaknya ada tiga modal berpengaruh dalam menciptakan praktik sosial pemilihan anggota legislative yaitu modal politik modal sosial dan modal ekonomi. Modal ekonomi memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik sosial pemilihan anggota legislative khususnya saat masa kampanye. Sedangkan arena adalah suatu sistem serta relasi-relasi kekuasaan dimana praktik sosial terjadi. Biasa disebut sebagai ruang sosial (*social space*).

Pada dasarnya dalam pandangan Bourdieu, yang disebut sebagai objektivisme adalah suatu pengetahuan obyektif yang mengandung dominasi, dan dalam kondisi ini, individu tidak bisa menolaknya. Sedangkan pengertian dari

subjektivisme sendiri adalah mengarah pada tindakan individu yang bertindak atau melakukan sesuatu di luar struktur.

Bourdieu memahami realitas sosial yang merupakan hubungan dialektika antara individu (agen, struktur subjektif) dengan struktur objektif. Dialektika ini melibatkan unsur-unsur subjektif seperti kognitif dan mental individual dan struktur pengalaman individual, yang berdialektika dengan struktur objektif. Dalam relasi dialektika ini, ada konsep-konsep untuk menjelaskan “struktur subjektif” dan “objektif” yang disebut sebagai “*habitus*” dan arena. *Habitus* merupakan apa yang dimiliki oleh individu. Pertemuan *habitus* dalam arena memunculkan modal (kapital), yang dapat merupakan kapital sosial, ekonomi, kultural dan simbolik. *Habitus*, arena, kapital menghasilkan kuasa simbolik.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma sosiologi karya Weber yaitu definisi sosial yang mempelajari bagaimana subjek dan informan mendefinisikan situasi sosial dalam tindakan dan integrasi.

Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. *Pertama*, konsep tindakan sosial. *Kedua*, konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama (Ritzer, 2016).

3.2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-kualitatif dalam bentuk studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Studi kasus merupakan penelitian kualitatif yang memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Studi ini amat mendalam hanya pada satu kelompok orang atau peristiwa. Ada tiga langkah dasar dalam menggunakan studi kasus; pengumpulan data, analisis, dan menulis. Hal pertama yang harus diingat tentang penggunaan studi kasus ini adalah bahwa kasus ini harus memiliki masalah bagi para peneliti untuk memecahkannya. Kasus ini harus memiliki informasi yang cukup di dalamnya, di mana peneliti dapat memahami apa masalahnya dan memungkinkan dikembangkan suatu kerangka analisis untuk memecahkan misteri kasus tersebut (Bungin, 2007).

Tiga langkah dasar dalam studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data, analisis, dan menulis (Bungin, 2007). Kemudian penelitian kualitatif memiliki *perspektif emic*, yang artinya data yang diperoleh harus “sebagaimana seharusnya”, sesuai dengan lingkungan sosial budaya dalam penelitian, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dipikirkan oleh subjek dan informan (Sugiyono, 2013).

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga (3) kabupaten di Propinsi Jawa Timur, di mana terdapat kasus upaya mengubah hasil pemilu dan berpengaruh terhadap keterpilihan anggota DPR RI dan DPRD Propinsi. Pemilihan lokasi penelitian atas dasar hasil keputusan DKPP, rekomendasi Bawaslu dan laporan dari Gakumdu.

3.4. Subyek dan Informan

Subyek atau unit analisis adalah orang yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian. Sedangkan informan disebut juga informan sekunder adalah pihak-pihak yang dapat diminta pendapat dan informasinya terkait kasus tersebut.

Dalam penelitian ini, subyeknya adalah 2 anggota KPU setiap kabupaten dan informannya adalah anggota kpu kabupaten (selain subyek), panitia pemilihan kecamatan (PPK), orang-orang partai politik dan pengawas pemilu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada subyek dan informan. Sedangkan observasi dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data hasil pemilu.

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiono, 2015).

3.7. Teknik Peningkatan Keabsahan

Untuk keabsahan atau validitas data, penelitian ini menggunakan metode:

1. Mentriangulasi sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan tersebut sudah akurat.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian. Deskripsi setidaknya harus berhasil menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan munculnya bias dalam penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemilu di Jawa Timur

Tanggal 17 April 2019 diselenggarakan pemilihan umum serentak nasional untuk lima jenis pemilu, yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu 2019 ini adalah pemilu serentak pertama di Indonesia yang menggabungkan 5 pemilihan sekaligus. Diantaranya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPRD propinsi dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Pemilu serentak ini digelar atas putusan MK pada Januari 2014 atas gugatan dari Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak.

Untuk pemilu anggota DPR RI, di Jawa Timur ada 11 daerah pemilihan (dapil) dengan alokasi kursi yang diperebutkan sebanyak 87. Jumlah calon anggota DPR RI yang turut dalam kontestasi ini sebanyak 1.185 orang tersebar di 16 partai politik. Sedangkan untuk pemilu anggota DPRD Propinsi terdapat 14 dapil dengan alokasi kursi 120 yang diperebutkan oleh 1.573 calon anggota DPRD Propinsi.

Pada pemilu 2019 ini, terdapat 131.171 TPS (tempat pemungutan suara) yang tersebar di 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan dan 8.497 desa/kelurahan. Pemilih yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 30.912.994 pemilih. Sedangkan pemilih yang menggunakan haknya dengan memberikan suara di TPS sejumlah 25.430.726 pemilih untuk pemilu anggota DPR RI dan 25.427.882 untuk pemilu anggota DPRD Propinsi.

Berikut ini disajikan beberapa statistik pemilu 2019 untuk pemilu anggota DPR RI dan DPRD Propinsi:

Tabel 1 Data tingkat partisipasi masyarakat pemilu anggota DPR RI tahun 2019 di Jawa Timur

DAPII	KAB/KOTA	DPT	Partisipasi	Prosentase
I	Surabaya	3.529.326	2.816.540	79,80%
	Sidoarjo			
II	Probolinggo	2.379.078	2.030.189	85,34%
	Pasuruan			
	Probolinggo			
	Kt. Pasuruan			
III	Banyuwangi	2.409.767	1.933.993	80,26%
	Bondowoso			
	Situbondo			
IV	Lumajang	2.698.531	2.088.732	77,40%
	Jember			
V	Malang	2.774.868	2.250.535	81,10%
	Kota Malang			
	Kota Batu			
VI	Tulungagung	3.338.186	2.745.069	82,23%
	Blitar			
	Kota Blitar			
	Kediri			
	Kota Kediri			
VII	Pacitan	3.042.915	2.425.194	79,70%
	Ponorogo			
	Trenggalek			
	Magetan			
	Ngawi			
VIII	Mojokerto	3.510.241	2.929.346	83,45%
	Jombang			
	Kt. Mojokerto			
	Nganjuk			
	Madiun			
	Kota Madiun			
IX	Bojonegoro	1.980.150	1.630.888	82,36%
	Tuban			
X	Lamongan	1.983.550	1.618.880	81,62%
	Gresik			
XI	Bangkalan	3.266.382	2.961.360	90,66%
	Sampang			
	Pamekasan			
	Sumenep			
TOTAL		30.912.994	25.430.726	82,27%

Tabel 1 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu DPR RI di Jawa Timur sebesar 82,27%. Angka partisipasi ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 81% dan melebihi target nasional sebesar 77,5%. Partisipasi masyarakat tertinggi di daerah pemilihan Jatim XI yang meliputi Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan yaitu sebesar 90,66%. Sedangkan partisipasi terendah di dapil Jatim I, Surabaya dan Sidoarjo, yakni sebesar 79,8%.

Tabel 2 Jumlah perolehan kursi parpol pemilu anggota DPR RI pada setiap daerah pemilihan di Jawa Timur tahun 2019

No	Parpol	DAERAH PEMILIHAN											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	PKB	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	19
2	Gerindra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3	PDIP	3	1	1	2	3	3	2	2	1	1	1	20
4	Golkar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
5	Nasdem	-	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1	9
6	Garuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Berkarya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PKS	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
9	Perindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PPP	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3
11	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PAN	1					1		1		1	1	5
13	Hanura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Demokrat	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	7
19	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	7	7	8	8	9	8	10	6	6	8	87

Tabel 2 menunjukkan jumlah perolehan kursi DPR RI setiap partai politik. Dari 87 kursi yang tersedia, sebanyak 20 kursi didapatkan oleh PDIP, kemudian PKB memperoleh 19 kursi, Gerindra 11 kursi, Golkar 11 kursi, Nasdem 9 kursi, PKS 2 kursi, PPP 3 kursi, PAN 5 kursi, dan Demokrat berhasil mendapatkan 7 kursi.

Tabel 3 Data tingkat partisipasi masyarakat pemilu anggota DPRD propinsi Jawa Timur tahun 2019

DAFIL	KAB/KOTA	DPT	Partisipasi	Prosentase
1	Surabaya	2.131.756	1.617.948	75,90%
2	Sidoarjo	1.397.570	1.196.853	85,64%
3	Probolinggo	2.379.078	2.030.137	85,33%
	Pasuruan			
	Probolinggo			
	Kota Pasuruan			
4	Banyuwangi	2.409.767	1.933.997	80,26%
	Bondowoso			
	Situbondo			
5	Lumajang	2.698.531	2.088.732	77,40%
	Jember			
6	Malang	2.774.868	2.250.551	81,10%
	Kota Malang			
	Kota Batu			
7	Tulungagung	1.909.954	1.549.563	81,13%
	Blitar			
	Kota Blitar			
8	Kediri	1.428.232	1.195.129	83,68%
	Kota Kediri			
9	Pacitan	3.042.915	2.425.212	79,70%
	Ponorogo			
	Trenggalek			
	Magetan			
	Ngawi			
10	Mojokerto	1.931.163	1.651.361	85,51%
	Jombang			
	Kota Mojokerto			
11	Nganjuk	1.579.078	1.277.298	80,89%
	Madiun			
	Kota Madiun			
12	Bojonegoro	1.980.150	1.630.891	82,36%
	Tuban			
13	Lamongan	1.983.550	1.618.850	81,61%
	Gresik			
14	Bangkalan	3.266.382	2.961.360	90,66%
	Sampang			
	Pamekasan			
	Sumenep			
TOTAL		30.912.994	25.427.882	82,26%

Tabel 3 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu anggota DPRD propinsi Jawa Timur sebesar 82,26%. Angka partisipasi ini melebihi target nasional sebesar 77,5%. Partisipasi masyarakat tertinggi di daerah pemilihan Jatim 14 yang meliputi Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan yaitu sebesar 90,66%. Sedangkan partisipasi terendah di dapil Jatim 1 (Surabaya), yakni sebesar 75,9%.

Tabel 4 Jumlah perolehan kursi parpol pemilu anggota DPRD Propinsi Jawa Timur tahun 2019

No.	Parpol	DAERAH PEMILIHAN														Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	PKB	1	2	2	3	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	25
2	Gerindra	1	1	2	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1	1	15
3	PDI P	3	1	1	2	2	4	2	2	3	2	2	1	1	1	27
4	Golkar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	13
5	Nasdem	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	2	9
6	Garuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Berkarya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PKS	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
9	Perindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PPP	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5
11	PSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PAN	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	6
13	Hanura	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Demokrat	1	-	1	1	1	1	-	1	2	1	1	1	1	2	14
19	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20	PKPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		8	6	9	9	11	11	7	6	12	8	6	7	8	12	120

Tabel 4 menunjukkan jumlah perolehan kursi DPRD Propinsi Jawa Timur masing-masing partai politik. Dari alokasi kursi sebanyak 120, PDIP mendapatkan kursi sejumlah 27 kursi, PKB mendapatkan 25 kursi, Partai Gerindra 15 kursi, Golkar 13 kursi, Nasdem 9 kursi, PKS 4 kursi, PPP 5 kursi, PAN 6 kursi, Hanura 1 kursi, Demokrat 14 kursi, dan PBB 1 kursi.

4.2. Hasil Penelitian

1. Persepsi Kemandirian Penyelenggara Pemilu 2019 di Jawa Timur:

Berikut ini adalah penyajian informasi yang berhasil diperoleh dari subyek dan informan terkait persepsi kemandirian penyelenggara pemilu dalam perspektif *emic* :

1. Bagi penyelenggara pemilu, prinsip kemandirian merupakan hal yang sangat penting tidak hanya bagi KPU tapi juga bagi badan *ad hoc* seperti PPK dan PPS dan harus dipegang teguh. Karena sejatinya kemandirian itu mengikat bagi seluruh penyelenggara seperti KPU dan jajarannya, Bawaslu dan DKPP. Menjadi penyelenggara harus *on the track* dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tidak terkecuali jika ada pihak-pihak diluar penyelenggara yang ingin mempengaruhi kemandirian penyelenggara dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Pada tingkatan terendah penyelenggara adalah KPPS, dimana KPPS bertugas di TPS tempat pemungutan dan perhitungan suara berlangsung. KPPS harus memperlakukan pemilih sama memperlakukan konstanta dalam pemilu harus sama, melayani tim pemenang atau saksi di TPS juga sama antara calon satu dengan calon lainnya. Yang kedua sebagai penyelenggara bentuk kemandirian adalah integritas dalam mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Suatu misal ada pengaruh pihak lain untuk memindah, merubah atau memanipulasi suara dengan maksud untuk memenangkan satu calon itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan jika itu terjadi bukan saja melakukan pelanggaran kode etik, melainkan melakukan pelanggaran pidana pemilu yang bisa terancam hukuman pidana. Selanjutnya jika ada pengaruh pihak lain, keberanian sebagai seorang penyelenggara adalah untuk menolak pengaruh atau mempengaruhi penyelenggara lainnya dalam menjalankan tugasnya untuk melanggar aturan yang dimaksud. Karena itu kalau terjadi seperti itu, keberanian untuk menolak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, selanjutnya sebagai penyelenggara di semua tingkatan termasuk di tingkatan bawah mandiri berarti adil. Hanya karena faktor misal ada kedekatan atau ada hubungan relasi interpersonal dengan pihak lain karena teman, kerabat maka hal itu tidak boleh mempengaruhi tindakan sebagai penyelenggara. Suatu misal karena merasa dekat dengan seorang calon atau tim pemenang, seorang penyelenggara mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu itu tidak dibenarkan dan melanggar aturan yang ada. Jadi makna kemandirian bermakna bahwa sebagai penyelenggara pemilu di semua tingkatan harus berpegang teguh pada prinsip perundang-undangan yang berlaku. Melayani sama rata dan melayani secara adil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan asas-asas pemilu dengan menggunakan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 UU Pemilu tahun 2017. Nah, ini wajib dipahami sebagai penyelenggara pemilu.
3. Frasa Kemandirian yang memiliki arti non partisan atau tidak menjadi anggota partai politik sebagai mana makna tidak ada keterikatan penyelenggara pemilu dengan kekuatan politik tertentu. Menolak untuk menerima uang, barang dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tiga hal penting dalam mewujudkan kemandirian yaitu: tidak berada di bawah pengaruh kepentingan politik tertentu, tidak boleh melakukan penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan politik tertentu serta menjalankan hukum, keadilan, etika. Sebagai penyelenggara dilarang atau tidak boleh menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hibah atau pemberian penghargaan dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan pemilu.
5. Mandiri itu independen dan tidak berpihak. Sebagai penyelenggara dan KPU sebagai sebuah lembaga penyelenggaraan pemilu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik atau pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta pemilihan umum. Selain itu, wajib menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.
6. Netral dalam kemandirian juga memiliki arti sebagai penyelenggara tidak boleh mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. Kemudian tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih.
7. Kemandirian itu ditunjukkan dengan tidak memakai, membawa atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada parpol atau dengan peserta pemilu tertentu. Penyelenggara tidak boleh memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain. Dan menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta pemilu dan tim kampanye. Penyelenggara juga harus menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta pemilu tertentu.

2. Implementasi Kemandirian dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019

Berikut ini adalah informasi yang berhasil diperoleh dari subyek dan informan terkait implementasi kemandirian penyelenggara pemilu dalam perspektif *emic* :

1. Praktek-praktek pelanggaran ada tiga yaitu administrasi, etik dan pidana. Ada dugaan pergeseran perolehan suara partai dan pergeseran perolehan suara antar caleg DPR RI di Jawa Timur di salah satu partai yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Pemilu 2019 di tiga kecamatan. Sebagai bentuk implementasi asas kemandirian dan menjaga integritas, maka komisioner KPU kabupaten melakukan rapat pleno dalam rangka penegakan kode etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Pemilu 2019 di tiga kecamatan tersebut. KPU propinsi Jawa Timur juga melakukan monitoring dan kajian hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik badan *ad hoc* berdasarkan hasil pleno. Adapun sanksi yang diberikan adalah pemberhentian tetap terhadap tiga ketua PPK dimaksud dan memberikan sanksi peringatan tertulis kepada anggota PPK yang terlibat di tiga kecamatan tersebut.
2. Praktek-praktek pelanggaran kemandirian oleh badan *ad hoc* sebetulnya hanya sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan badan *ad hoc*. Akan tetapi sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan, tetap akan mencederai proses demokrasi yang berlangsung. Berbicara pertanggungjawaban badan *ad hoc* sama seperti anggota KPU, ada dua garis pertanggungjawaban. Garis ke atas yang merupakan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan garis ke samping yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini yang terkadang dilalaikan dengan iming-iming berupa materi. Materi disini sendiri sangat luas, bisa uang, bisa pekerjaan, bisa janji-janji lain yang menguntungkan secara sepihak calon. Upaya penegakan asas kemandirian saat itu, di mana badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan dilaporkan ke Bawaslu dan kepolisian terkait dugaan pemindahan suara dari partai tertentu kepada caleg tertentu. Setelah dilakukan pemeriksaan bersama tim Gakumdu disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran pidana sehingga harus di sidang di pengadilan umum.
3. Pelanggaran terkait implementasi kemandirian terjadi untuk pemilu anggota DPR RI dan pemilu anggota DPRD Propinsi. Kasus ini terkuak pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu 2019 yang dilaksanakan di tingkat kabupaten mulai tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019. Pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 29 April dan 30 April berjalan lancar dan aman, namun pada tanggal 1 Mei 2019 terjadi protes dari salah seorang saksi partai X (untuk memudahkan penyebutan) dan Bawaslu yang menemukan

pergeseran atau perubahan suara pada caleg DPRD Provinsi dari partai Y nomer urut dua tersebar di tiga kecamatan yaitu kecamatan A, B, dan C. Perbedaan hasil perolehan suara caleg tersebut diketahui ketika pembacaan formulir DA1 oleh PPK dari ketiga kecamatan tersebut. Perolehan suara yang dibaca oleh PPK berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam formulir yang dipegang atau dimiliki saksi partai X, sementara saksi partai Y tidak menganggap perbedaan suara tersebut merupakan permasalahan karena tidak ada bukti keberatan dari saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saksi partai Y berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan itu secara internal partai karena pergeseran suara yang di maksud oleh saksi dari X dan Bawaslu terjadi antar calon dalam satu partai dan bukan lintas partai. Formulir DA1 yang dibaca PPK dalam rekapitulasi tersebut diambil dari dalam kotak tersegel yang ada dalam penguasaan KPU kabupaten setelah diterima dari PPK dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten dan semua saksi yang hadir. Dalam peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten untuk menyelesaikan kasus ini di tingkat provinsi mengingat kasus tersebut terjadi pada Caleg DPRD Provinsi. Sebetulnya pelanggaran badan *ad hoc* ini bersumber dari TPS di mana pada saat proses perhitungan menuliskan hasil perhitungan dalam C1 plano dan form C1. Di C1 Plano dan form C1 dituliskan hasil perhitungan partai X berapa dan calon X berapa. C1 plano ini menjadi sumber data dan dasar hukum ketika terjadi perselisihan. Terkadang antara C1 plano dengan form C1 berbeda yang mengakibatkan kejadian fatal pada saat melakukan rekapitulasi menuliskan hasil form DAA di tingkat kecamatan. Selain itu, pelanggaran itu terjadi karena tidak jelinya Bawaslu melakukan pengawasan proses rekapitulasi. Selainnya itu pihak saksi yang memang secara struktur tidak membreakdown hasil dari tingkat TPS ke kecamatan. Sumber pelanggaran lainnya adalah kurangnya pemahaman saksi tentang banyaknya form yang KPPS gunakan saat proses tungsura serta saksi di TPS berbeda dengan saksi di kecamatan.

4. Salah satu pelanggaran etik yang pernah dilakukan oleh badan *ad hoc* yang lain adalah larangan untuk melakukan pertemuan bahkan berfoto dengan peserta pemilu yang bisa menimbulkan kesan publik terjadi pemihakan kepada peserta pemilu. Pihak terlapor melakukan swafoto dengan paslon pilbup dari partai tertentu dan terlapor memakai jas partai dan foto-foto tersebut diunggah ke media sosial. Selain itu badan *ad hoc* terlapor ikut serta dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur saat itu yang juga sedang menjadi calon anggota DPR RI. Sanksi yang diberikan saat itu adalah teguran tertulis dari DKPP lewat KPU kabupaten.
5. Contoh-contoh kasus yang terjadi di lapangan. Banyak kepentingan yang muncul dan sebagai penyelenggara harus bisa mengakomodir kepentingan tersebut. Mengakomodir bukan berarti berpihak. Mengakomodir itu saat ada banyak kepentingan dan itu bisa dilakukan

secara adil pada semua kalangan. Tidak berat sebelah pada salah satu pihak dan itu sebagai sebuah solusi dan tidak dimaknai pelanggaran kemandirian. Satu misal di TPS ada saksi, pemantau dan pihak lain yang berkepentingan yang kesemuanya memiliki kepentingan. Sebagai penyelenggara harus bisa mengakomodir kepentingan tersebut dengan berpegang pada undang-undang dan regulasi lainnya. Begitu juga rekap ditingkat kecamatan, solusi bisa dilakukan oleh KPU dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kemandirian. Karena berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan pemilu yang harus berintegritas. Penyelenggaranya berintegritas, pemilihnya berintegritas, calonnya berintegritas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

4.3. Pembahasan

1. Kemandirian KPU

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perubahan sosial terjadi di masyarakat beserta struktur didalamnya seperti kaidah sosial, lembaga sosial, atau strata sosial. Kesemuanya akan memberikan pengaruh bagaimana struktur dan lahirnya hukum yang ada di masyarakat. Dari sisi ontologis, sosiologi mengkaji bagaimana hubungan manusia dalam bermasyarakat. Secara epistemologis sosiologi mempelajari bagaimana interaksi yang ada di masyarakat kaitannya dengan kebutuhan untuk berhubungan dan berinteraksi. Kehidupan dengan tujuan normatif yang diharapkan bisa terwujud dengan waktu sosialisasi yang cukup panjang agar tercipta tatanan dan norma efektif yang disepakati untuk mewujudkan kemapanan sosial.

Demikian halnya terkait pelaksanaan pemilu, Indonesia telah menjadikan undang-undang dan segenap regulasi sebagai hukum untuk menjalankan fungsinya secara sosiologis dalam mewujudkan hasil pemilu yang berintegritas dan calon-calon terpilih yang berkualitas.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk kedaulatan di tangan rakyat adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD. Indonesia memiliki sejarah panjang perjalanan pelaksanaan pemilu di mulai tahun 1955 yang

memilih anggota Konstituante dan DPR. Pada masa orde baru, dalam kurun waktu 32 tahun dari 1966 sampai dengan 1998, Indonesia telah melaksanakan enam kali Pemilu. Terdapat banyak catatan *hitam* selama penyelenggaraan pemilu di era tersebut. Pemilu di era orde baru dianggap masih jauh dari nilai-nilai demokratis (penuh rekayasa, intimidasi, ketidaksetaraan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu bias kekuasaan).

Pemilu yang *luber jurdil* merupakan perwujudan dari kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sedangkan penyelenggaraan pemilu agar *luber* dan *jurdil* bergantung dari konsep tata kelola pemilu. Tata kelola pemilu merupakan campuran dari dua hal yaitu manajemen dan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Adapun dimensi tata kelola pemilu berdasarkan siklus pemilu dalam Catt.et.al (2014:16) yakni nilai prinsip dan asas pemilu, sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, tahapan pemilu, manajemen kepemiluan, dan keadilan pemilu. Nilai, prinsip dan asas pemilu merupakan bagian terpenting dan pondasi dalam bangunan tata kelola kepemiluan yang demokratis. Sedangkan melaksanakan tata kelola kepemiluan yang demokratis ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan inklusif, serta *luber jurdil*.

Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung berdasarkan norma-norma yang merupakan standar universal pelaksanaan pemilu di suatu Negara. Apakah pemilu tersebut berlangsung tanpa kekerasan, bebas memilih, tidak ada kecurangan, tidak terjadi diskriminasi, tidak terjadi manipulasi suara, bahkan tidak terjadi pelanggaran administrasi yang menyebabkan hilangnya hak pilih dan memilih seseorang.

ACE Project, 2012 melihat ada empat hal yang harus dilaksanakan dalam pemilu berintegritas antara lain: (1) Perilaku etik dari penyelenggara, peserta dan pemantau pemilu yang menjadi asas, dasar dan pedoman untuk ditujukan ke hadapan publik; (2) Jujur, yang merupakan cermin perilaku bagi penyelenggara pemilu untuk adil dan

memberikan ruang yang sama bagi peserta pemilu dan pemilih; (3) Ketidakberpihakan yang berupa tindakan mandiri (netral) terhadap siapapun yang menjadi bagian dari kompetisi pemilu, netral dalam bersikap terhadap peserta pemilu dalam setiap pembuatan regulasi pemilu, dalam setiap tahapan atau netral saat menghadapi sengketa hasil pemilu; (4) Keterbukaan dan tanggungjawab yang berarti bahwa publik dan peserta pemilu memiliki hak untuk mengetahui di mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai aspek pembuatan keputusan. Legitimasi dan keabsahan pemilu akan kuat jika transparansi dan akuntabilitas terjadi pada setiap proses tahapan pemilu, misalnya terkait informasi anggaran dan tender logistik.

Pemilu yang berintegritas akan melahirkan pemilu yang berkualitas dengan hasil terpilihnya calon-calon yang berintegritas dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Partisipasi masyarakat datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan menjadi tolak ukur partisipasi politik masyarakat dalam berdemokratisasi di suatu daerah. Tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan ikut serta dalam pemilu.

Selanjutnya beberapa faktor masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, biasa diantaranya karena faktor dari dalam seperti pekerjaan yang menyebabkan tidak bisa berada pada lokasi pemilihan yang ditunjuk. Sedangkan faktor dari luar seperti faktor administrasi dan keberhasilan program sosialisasi Pendidikan pemilih oleh penyelenggara pemilu (KPU). Partisipasi masyarakat juga sebagai bentuk legitimasi dari calon terpilih atas dukungan pemilihnya.

Penyelenggara pemilu terikat pada prinsip dan kode etik yang berisi seperangkat nilai yang dikehendaki undang-undang dan mengikat penyelenggara pemilu dan memiliki tujuan tercapainya pemilu yang berintegritas. *International IDEA* merumuskan ada tujuh prinsip yang harus dimiliki seorang penyelenggara pemilu yaitu *independen, imparcialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan pelayanan*.

Ketujuh prinsip dari *International IDEA* tersebut dijabarkan kembali ke dalam prinsip penyelenggara pemilu di Indonesia yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 dan pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) No 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Adapun prinsip-prinsipnya dijabarkan menjadi 13 (tiga belas) prinsip, yaitu: mandiri, jujur, adil, akuntabel, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, kepentingan umum dan aksesibilitas.

Kemandirian yang menjadi prinsip KPU dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemilu memiliki arti bahwa KPU harus mandiri serta bebas dari pengaruh kekuatan unsur apapun dan tetap berpedoman kepada undang-undang. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kemandirian KPU bersifat satu kesatuan. Mandiri secara kelembagaan, fungsional dan personal.

2. Kejadian pelanggaran kemandirian karena hubungan personal dan materi dalam perspektif Bourdieu

Berdasarkan hasil penelitian, informan menyampaikan beberapa tantangan/hambatan terkait implementasi kemandirian KPU selama Pemilu 2019. Hasil wawancara dengan subjek sebagian besar menyatakan bahwa pelanggaran terhadap etika kemandirian sebagai penyelenggara lebih banyak terjadi saat tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Beberapa catatan yang terjadi antara lain:

- a. Tidak netralnya penyelenggara dengan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu atau lebih peserta pemilu seperti mengadakan pertemuan, berfoto bersama dan diunggah di media sosial yang menunjukkan keberpihakan dan kesan tidak netral kepada publik.
- b. Petugas PPK disuap oleh peserta pemilu.
- c. Terjadi manipulasi atau kecurangan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan menggeser suara calon dalam satu partai.

Ketidakmandirian badan *ad hoc* sebagai penyelenggara Pemilu 2019 bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya proses pemilihan badan *ad hoc* oleh anggota KPU itu sendiri. Persyaratan larangan bagi penyelenggara pemilu untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik sangat mudah dipenuhi oleh masyarakat. Kita mengetahui bahwa partai politik di negara kita tidak memiliki dokumentasi administrasi yang baik, secara khusus terkait pencatatan keanggotaan partai politik. Ini menjadi peluang masuknya partisan partai politik menjadi penyelenggara pemilu.

Selain itu kedekatan hubungan personal antara penyelenggara dengan peserta pemilu juga menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran kemandirian. Penyelenggara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta memiliki kewajiban mengumumkan kepada publik. Akan tetapi jika hubungan kekerabatan itu di luar hubungan legalitas kekerabatan yang tercantum dalam kartu keluarga, maka akan sulit untuk mendeteksi kecuali masyarakat memberikan informasi. Belum lagi kedekatan karena faktor kesamaan dalam sebuah organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemahasiswaan. Kedekatan hubungan seperti ini akan sangat sulit dideteksi dan rawan memicu pelanggaran kemandirian. Rasa sungkan kepada senior menjadi pemicu penyelenggara menuruti kemauan peserta pemilu.

Kedekatan hubungan personal antara penyelenggara pemilu dengan peserta juga terjadi karena faktor kesamaan hubungan organisasi masyarakat atau organisasi kemahasiswaan antara penyelenggara dengan peserta pemilu. sikap patuh dan taat atas perintah “senior” menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran kemandirian penyelenggara pemilu.

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu ini melahirkan sejumlah pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu 2019. Beberapa pelanggaran yang tercatat dan dilaporkan sangat kecil dan merupakan fenomena gunung es. Mengapa ini terjadi, karena ada duplikasi pelanggaran. Persaingan ketat antara sesama calon selama pemilihan legislatif tidak menghasilkan kontrol yang ketat, malahan melahirkan duplikasi-

duplikasi pelanggaran lainnya. Artinya, jika ada satu calon beserta tim kampanye melakukan pelanggaran calon lainnya tidak mempersoalkan dan melaporkan ke Bawaslu, justru meniru pelanggaran tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena calon beserta tim kampanye tidak memiliki keberanian untuk tampil bersih di depan publik serta kurang memiliki integritas.

Menurut Bourdieu, ada empat konsep kapital (modal) untuk menunjukkan keseluruhan sumber daya atau kualitas individu-individu yang memiliki pengaruh sosial yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal simbolik dan modal budaya. Penyelenggara pemilu merupakan modal simbolik negara pada penyelenggaraan pemilihan umum. Kemampuan penyelenggara pemilu dalam menunjukkan simbol kemandiriannya akan membawa rasa kepercayaan rakyat terhadap hasil dari penyelenggaraan pemilu. Kemandirian menjadi keniscayaan untuk memastikan pemilu sebagai arena transformasi kekuasaan yang tidak bisa mendapatkan intervensi dari siapapun dan lembaga apapun, karena penyelenggara pemilu hanya patuh pada regulasi yang ada.

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh oknum badan *ad hoc* menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu pada dasarnya rentan terkooptasi oleh kepentingan politik praktis. Calon-calon petahana (yang sudah memiliki kursi pada periode sebelumnya) memiliki modal sosial yang lebih untuk kedekatan dengan penyelenggara dibandingkan calon-calon yang bukan petahana. Modal sosial ini terbentuk secara alamiah oleh banyaknya gesekan organisasi *civil society* antara penyelenggara dengan calon yang memaksa penyelenggara melakukan kontrak politik tersembunyi dengan calon-calon anggota legislatif (peserta pemilu).

Teori Bourdieu memadukan antara objektivisme dan subjektivisme. Konsep habitus dalam teori Bourdieu, bahwa dalam unsur penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu sebagai penyelenggara berhubungan dengan individu lain yang dalam hal ini adalah *stake holder* dalam

jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial menciptakan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Relasi habitus, arena dan modal bahwa arena bukanlah ruang kosong menurut Bourdieu, tetapi merupakan sebuah ranah (tempat) untuk mendapatkan posisi-posisi, mendeskripsikan bahwa identitas dan struktur sosial bukanlah sesuatu yang statis untuk dipahami. Habitus anggota KPU kabupaten dan badan *ad hoc* dibawahnya sebagai penyelenggara pemilu berkaitan erat dengan modal-modal simbolik yang bisa jadi berupa status, ekonomi dan budaya. Modal-modal simbolik ini yang nantinya akan ditukar dengan posisi yang memunculkan kekuasaan. Seseorang yang memiliki modal dengan habitus yang memadai akan menguasai arena dan memenangkan relasi sosial (pertarungan politik).

Habitus bisa bertahan lama, meskipun tidak selamanya. Ini dikarenakan manusia tidak selalu berada dalam dunia sosial dengan struktur dan wacana yang sama. Perubahan sosial, perubahan regulasi akan mengakibatkan terjadinya perubahan habitus penyelenggara pemilu. Manusia tidak bisa terlepas dari pertarungan wacana saat melakukan komunikasi, dan sebagai proses manusia menjadi dominan kepada manusia yang lainnya dengan didukung modal yang dimilikinya.

Habitus yang digunakan penyelenggara pemilu yang nakal untuk melakukan kecurangan antara lain mengubah hasil rekapitulasi di level yang bisa dijangkaunya/dalam kewenangannya. Semisal, kecurangan yang dilakukan oleh badan *ad hoc* PPK dilakukan di tingkat kecamatan. Sedangkan modal yang ditawarkan berupa modal ekonomi (sejumlah uang). Ketika habitus dan modal sudah disepakati oleh kedua belak pihak, maka seperti konsep Pierre Bourdieu akan muncul arena pertarungan politik. Arena merupakan penentuan akhir dari habitus dan modal yang menjadi pertarungan politik untuk mendapatkan kursi yang diharapkan. Sedangkan hasil rumusan habitus, modal dan arena akan menghasilkan praktik sosial, yang dalam hal ini adalah pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

3. Implementasi keterpaksaan kemandirian penyelenggara pemilu karena regulasi dalam perspektif Bourdieu

Implementasi pelanggaran kemandirian dari sisi etik dan profesionalitas. Ada perbedaan antara etika penyelenggara dan profesionalitas penyelenggara (aturan tugas kewajiban wewenang sebagai penyelenggara pemilu). Etika kemandirian penyelenggara pemilu harus diinternalisasi kedalam diri penyelenggara itu sendiri secara otomatis tanpa dipelajari dengan seksama. Sedangkan tugas kewajiban dan wewenang penyelenggara pemilu harus dipelajari terlebih dahulu. Sebagaimana contoh ketika menjelang tahapan pemilu, salah seorang calon mengajak bertemu di luar kantor KPU. Masyarakat secara otomatis akan melihat bahwa penyelenggara tersebut tidak netral. Kemandirian sebagai penyelenggara pada kejadian tersebut tidak harus dipelajari, karena kita pasti mengetahui bahwa penyelenggara harus netral dan bentuk wujudnya tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa kita memiliki kedekatan khusus dengan peserta pemilu.

Sebagai penyelenggara pemilu, kode etik melekat secara otomatis. Akan ada hak-hak politik yang dikurangi. Sebagai penyelenggara pemilu, terpaksa tidak boleh menggunakan hak-hak politiknya secara penuh karena ada regulasi yang melarang. Penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak, tidak boleh bergabung dalam partai politik, tidak boleh menyampaikan pendapat di depan umum yang menimbulkan kecurigaan masyarakat tentang kenetralan penyelenggara pemilu kemudian ruang gerak politik penyelenggara yang dibatasi. Penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu, dan DKPP dipaksa mandiri sebagaimana diatur dalam regulasi dan ikrar sumpah pada saat menjabat sebagai penyelenggara.

Bourdieu menemukan rumus dasar tentang munculnya praktik sosial dengan persamaan (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Sosial. Habitus penyelenggara dalam hal ini adalah kemampuan dan kemauan penyelenggara untuk memahami dan terus menerus belajar tentang

regulasi implementasi kode etik kemandirian sebagai penyelenggara pemilu. Habitus itu sendiri adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh penyelenggara pemilu dan tercipta dari internalisasi nilai-nilai yang berlangsung lama sehingga menjadi cara berpikir dan pola perilaku penyelenggara pemilu. Termasuk juga nilai-nilai kemandirian sebagai penyelenggara pemilu.

Agen dalam teori Pierre Bourdieu adalah individu yang menjadi subyek sosial dan relasinya dengan struktur sosial. Struktur sosial itu sendiri ada dalam dua dimensi yaitu struktur obyektif dan struktur subyektif. Dalam relasi sosial penyelenggaraan Pemilu 2019 struktur obyektif adalah struktur yang terpampang dalam struktur sosial dimasyarakat seperti struktur organisasi partai, organisasi masyarakat dan semua struktur organisasi yang berada dilingkaran agen. Sedangkan struktur subyektif adalah struktur yang berada dalam diri individu penyelenggara. Yang dimaksud dalam hal ini adalah hasil internalisasi regulasi-regulasi kemandirian penyelenggara pemilu.

Bourdieu menekankan hubungan *vis a vis* antara agen dengan struktur yang bersifat dialektik. Agen sebagai bagian dari individu mustahil menafikan kondisi-kondisi yang berada pada struktur obyektif yang mengatur bagaimana cara bersikap, berbicara dan berhubungan dengan individu lainnya. Untuk tahapan ini, internalisasi eksternalitas area melalui agen bekerja, bagaimana agen sebagai individu harus mampu mempengaruhi struktur obyektifnya. Sebagai penyelenggara pemilu, agen harus mampu mempengaruhi struktur obyektif seperti kebiasaan memberikan “suguh gupuh” bagi orang yang dihormati saat konstestasi politik berlangsung, kebiasaan “money politik”, kebiasaan “taat dan patuh” terhadap senior menjadi habitus yang positif sebagai hasil internalisasi habitus agen.

Sedangkan modal dalam hal ini adalah modal politik yang bisa berarti regulasi yang mengatur kode etik sebagai penyelenggara pemilu. diantaranya adalah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU No 8 Tahun 2019. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Modal politik menjadi dasar hukum bagi penyelenggara pemilu dalam berperilaku dan mengambil keputusan.

Arena menurut Bourdieu adalah tempat para agent melaksanakan praktik-praktik sosial. Arena adalah tempat bagi pertarungan-pertarungan kekuasaan untuk meraih kursi-kursi parlemen berlangsung. Struktur sosial dalam arena Bourdieu sangatlah dinamis karena sangat mungkin terjadi perpindahan-perpindahan posisi dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Perjuangan perebutan kursi parlemen ini membutuhkan serangkaian tindakan berdasarkan apa yang dimiliki oleh agen.

Dalam hal ini arena adalah ruang-ruang praktik sosial politik penyelenggara pemilu, proses tahapan-tahapan pemilu terjadi. Tahapan pemilu merupakan satu rangkaian peristiwa penting yang berjalan bersamaan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Tahapan pemilu tersebut meliputi: pemutakhiran daftar pemilih; pencalonan; kampanye; pemungutan dan perhitungan suara; rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Kelima proses tahapan pemilu ini adalah arena praktik sosial penyelenggara pemilu dalam implementasi kemandirian sebagai penyelenggara yang diatur ketat oleh regulasi.

Praktek sosial menurut Bourdie memiliki beberapa karakteristik yaitu ruang, waktu sebagai karakteristik pertama dan diatur secara sadar dan tidak sadar sebagai karakteristik kedua. Praktik sosial ketidakmandirian penyelenggara KPU adalah bentuk improvisasi badan *adhoc* dalam melakukan interaksi sosial. Hal ini karena agen secara semesta adalah bagian integral dari dunia sosial

Praktek-praktek sosial ketidakmandirian penyelenggara KPU masih saja terjadi meskipun jika dihitung merupakan sebagian kecil. Seperti upaya pergeseran suara salah satu caleg di salah satu partai

politik yang dilakukan oleh badan *ad hoc* agar peserta yang dimaksud bisa mendapatkan kursi legislatif, melakukan ketidaknetralan dengan menyampaikan opini publik atau berfoto dengan peserta, melakukan pergeseran suara saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Struktur subyektif tentang ketidakmandirian yang dimiliki agen badan *ad hoc* harus mampu dikontrol oleh struktur obyektif yang dimiliki penyelenggara di atasnya seperti KPU kabupaten/kota. Karenanya proses internalisasi habitus yang dimiliki oleh penyelenggara di atasnya harus kuat dan mengakar. Ini harus dilakukan agar terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini, konsep Pierre Bourdieu mampu menjawab bentuk habitus, modal dan arena yang menunjukkan adanya praktik sosial berbagai bentuk dugaan pelanggaran kemandirian penyelenggara KPU. Ketidakmandirian penyelenggara pemilu ini bisa terjadi karena faktor materi, latar belakang keaktifan di partai politik, kekerabatan dan kesamaan hubungan organisasi dengan peserta pemilu. Sedangkan keterpaksaan pelaksanaan kemandirian penyelenggara pemilu adalah karena faktor regulasi kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Akan tetapi kemandirian KPU sebagai lembaga yang menyelenggaraan pemilu tidak dapat dilihat dari aspek kepemiluan saja, akan tetapi berkaitan juga dengan aspek individu penyelenggara itu sendiri. Kemampuan penyelenggara pemilu menunjukkan simbol kemandirian sebagai salah satu modal sosial akan membawa rasa kepercayaan rakyat.

5.2. Saran

Menjadikan KPU sebagai lembaga yang benar-benar mandiri harus dimulai dari pengisian personil-personil dalam lembaga itu. Rekrutmen penyelenggara pemilu sekarang ini, pada prakteknya selalu mengakomodasi unsur-unsur kelompok kepentingan. Pola tersebut menjadikan keberadaan

KPU yang mandiri hanyalah mimpi, oleh karena itu perlu perbaikan dalam pola rekrutmen penyelenggara pemilu.

Kode etik penyelenggara pemilu yang tertuang dalam regulasi adalah sebuah idealitas yang harus menjadi nilai yang terinternalisasi bagi semua penyelenggara pemilu. Oleh karena itu selain memilih penyelenggara dengan melihat rekam jejaknya secara komprehensif, juga dibutuhkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai etik agar habitus “baik” yang ada tetap bertahan bahkan seharusnya mendominasi arena kontestasi regenerasi.



DAFTAR PUSTAKA

- ACE Project. 2012. *The encyclopedia: Electoral Integrity*. <http://aceproject.org/ace-en>.
- Arief Budiman, 2019, *Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas*: makalah yang disampaikan dalam Kuliah Umum di Universitas Jember, Jawa Timur.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada. Jakarta.
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Catt, Helena, Andrew Ellis, Michael Maley, Alan Wall dan Peter Wolf. 2014. *Electoral Management Design*. Stockholm: International IDEA.
- Hanafi, A. 2016. Jurnal Ide : Mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas. *Keterbukaan Jembatan Meneguhkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas*. KPU Jatim.
- Hasyim Asy'ari. 2019. *Konsolidasi Demokrasi; Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Penerbit Thafa Media. Yogyakarta.
- John W. Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kemitraan. 2011. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Perhitungan Suara*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan : Jakarta Selatan.
- Kompas, 2019, *Pengamanan Pemilu 2019 Polda Jatim Fokus di Madura dan Tapal Kuda*,
<https://amp.kompas.com/regional/read/2019/04/15/15512121/pengamanan-pemilu-2019-polda-jatim-fokus-di-madura-dan-tapal-kuda>.
- KPU Jatim. 2019. *Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019*. Tidak dipublikasikan.
- Marijan Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Pustaka .ureka, Surabaya, Hal 89
- Mutahir, Arizal. 2011. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu : Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Kencana.

- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 2016. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Supriyanto. 2020. *Didik Supriyanto : Mandiri Karakter Utama Penyelenggara Pemilu*. <https://dkpp.go.id/didik-supriyanto-mandiri-karakter-utama-penyelenggara-pemilu/>
- Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Sosiologi untuk Universitas*. Refika Aditama. Bandung.

Hasil Penelitian

- Kurniawan, H. G., 2011, *Komunitas Sipil Dan Perilaku Memilih Dalam Pemilu Legislatif 2009 (Studi Tentang Pengaruh Komunitas Sipil Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pemilu Legislatif)*, Tesis, Program Studi Sosiologi Fakultas ISIP UGM, Yogyakarta.
- Suryanef, 1999, *Faktor-Faktor Yang Menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda Dalam Pemilu 1997 (Kasus Di Kotamadya Padang)*, Tesis, Program Studi ilmu Politik UGM, Yogyakarta.
- Ummatin, Khoiro, 2000, *Perilaku Memilih Kiai Pesantren Di Yogyakarta Pada Pemilu 1999*, Tesis, Program Studi Sosiologi Fakultas ISIP UGM, Yogyakarta.
- Utuh Suparto, 2009, *Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Demokrasi Langsung (Studi Kasus Pilkada Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat)*, Tesis, Kosentrasi Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

UUD 1945

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- . 2017. *Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.*
- . 2018. *PKPU No.11 Tahun 2018. Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.*
- . 2019. *PKPU No 8 Tahun 2019. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.*

